

Jakarta, 11 Juni 2026

Nomor : 713/AKD.LPKN/PBJL1/VI/2026
Hal : Undangan Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level 1 LKPP
Lampiran : 5 Halaman

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pimpinan
Di -
Tempat

**Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level - 1
(48 JP Model Pembelajaran Blended Learning)**

Dengan Hormat,

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mengingat amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah Menyusun program Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Level 1, dengan model pembelajaran Blended Learning. Menindaklanjuti hal tersebut maka Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) sebagai LPPBJ Terakreditasi A LKPP, akan melaksanakan Program dimaksud di Kota Jakarta, dengan jadwal :

- **E-Learning & Webinar** : 27 Agustus – 09 September 2026
- **Tatap Muka** : 10 – 11 September 2026
- **Uji Kompetensi** : 12 September 2026
- **Tempat** : Hotel The Tavia Heritage, Jl. Letjen Suprpto No. 1, Jakarta Pusat

Kegiatan ini disusun berdasarkan Kurikulum Nasional dengan fasilitator Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang telah bersertifikat TOT LKPP.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pemenuhan SDM bersertifikat kompetensi pengadaan Barang/Jasa pada setiap Intansi, maka di harapkan Kepada Para Pimpinan untuk dapat mengikuti dan atau menugaskan Aparatur/Pegawai yang membidangi Pengadaan pada kegiatan dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Umum
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)



**Andi Zabur Rahman, S.Kom. S.Si., MBA.,
CHt., MT, NNLP, CPSP., CCMs., CPSt**



Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level - 1
(48 JP Model Pembelajaran Blended Learning)

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) memegang peranan krusial dalam memastikan layanan publik berkualitas tinggi dan pemerataan pembangunan, yang turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Untuk merealisasikan layanan publik yang unggul, maka Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah (K/L/PD) memerlukan pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) yang kompeten. **Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** mengatur SDM PBJ harus mempunyai kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk merealisasikan layanan publik yang unggul, maka Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah (K/L/PD) memerlukan pengadaan barang/jasa yang efisien dan efektif.

Pengadaan barang/jasa yang berkualitas tidak hanya esensial untuk suksesnya pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional melalui penggunaan anggaran belanja negara. Oleh karena itu, proses pengadaan ini harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang PBJP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dalam pengadaan barang/jasa harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap (attitude) sesuai Standar Kompetensi ASN.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pegawai Negeri Sipil yang terlibat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atau Pokja Pemilihan harus memiliki sertifikat kompetensi. Untuk mendukung pengembangan kompetensi ini, diperlukan program pelatihan yang sesuai dengan Standar Kompetensi PBJP Level-1. Ini menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang pada akhirnya mendukung peningkatan layanan publik dan pembangunan ekonomi yang merata.

B. Landasan Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
- Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Materi Pelatihan

Untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 6 kompetensi sebagai berikut:

1. Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
4. Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola
6. Pengantar Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management)

Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level - 1
(48 JP Model Pembelajaran Blended Learning)

D. Durasi Pelatihan

Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 dilaksanakan dengan jumlah JP sebanyak 48 (empat puluh delapan) JP atau setara dengan 12 (dua belas) hari dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelatihan Secara Mandiri selama 30 (tiga puluh) JP yang dapat dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dan dilakukan secara daring melalui Learning Management System Pusdiklat PBJ; dan
- b. Pelatihan Tatap Muka selama 18 (delapan belas) JP yang dapat dilaksanakan selama minimal 2 (dua) hari . Tahapan ini dapat dilaksanakan secara daring atau melalui tatap muka klasikal.

E. Metode Pembelajaran

- Kelas Tatap Muka selama 2 hari
- Uji Kompetensi selama 1 hari

F. Kepersertaan

- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Anggota TNI
- Anggota Polri
- BUMN
- Badan Layanan Umum (BLU/BLUD)
- Perusahaan
- Institusi Lainnya

G. Persyaratan Peserta

- a. Persyaratan Administratif
 1. ASN/Anggota TNI/Anggota Polri/BUMN/Perusahaan/Institusilainnya dengan pendidikan minimal
 2. SMA/Sederajat
 3. Belum memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level 1; dan
 4. Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian/pengembangan
 5. SDM atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- b. Persyaratan Dokumen
 1. Dalam hal calon Peserta dari ASN/Anggota TNI/Anggota Polri/BUMN/Perusahaan/Institusi lainnya maka calon Peserta menyampaikan surat tugas dari pimpinan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian/pengembangan SDM/Kepala UKPBJ/pejabat berwenang lainnya di setiap instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi asal calon Peserta;
 2. Dalam hal calon Peserta berasal dari individu maka tidak diperlukan surat usulan dan surat tugas cukup dengan surat pernyataan kesediaan sebagaimana huruf dan
 3. Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1. Pernyataan ini dituangkan dalam bentuk Surat Komitmen dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam portal pendaftaran pelatihan.

Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level - 1
(48 JP Model Pembelajaran Blended Learning)

c. Persyaratan Teknis

1. Calon Peserta telah memiliki akun pada laman <https://ppsdm.lkpp.go.id>
2. Dalam hal calon Peserta belum memiliki akun pada laman sebagaimana dimaksud huruf a), maka calon Peserta harus membuat akun terlebih dahulu;
3. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud huruf b) paling lama H-3 sebelum pelaksanaan pelatihan dalam Learning Management System
4. Pembuatan akun secara mandiri di Portal PPSPDM <https://ppsdm.lkpp.go.id> ; tata caranya dapat dilihat pada tautan berikut: <https://tu-pusdiklatpbj.gitbook.io/doc-portal-ppsdm/peserta/membuat-akun-peserta-pelatihan-sertifikasi>
5. Memastikan akun sudah teraktivasi
6. Apabila terdapat kendala pada akun, klik bantuan pada halaman log in Portal PPSPDM

H. Biaya Pelatihan dan Sertifikasi

- Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi : **Rp. 5.500.000**
- Penginapan, sarapan, dan Makan Malam selama 4 Hari 3 Malam (*twin share*) : **Rp. 6.750.000**
- Penginapan, sarapan, dan Makan Malam selama 4 Hari 3 Malam (*single*) : **Rp. 7.250.000**

I. Fasilitas Peserta

- Mengikuti e- Learning selama 10 (sepuluh) hari
- Mengikuti kelas Online sebanyak 2 (dua) kali Pertemuan
- Mengikuti kelas Tatap Muka selama 2 hari
- Mengikuti Ujian Kompetensi LKPP 1 Hari
- Materi dan Modul Softcopy
- Materi dan Modul Hardcopy
- Hardcopy dan Softcopy Perpres 46 tahun 2025 (Konsolidasi)
- Softcopy Perlem LKPP dan Standar Model Dokumen
- Tas dan Kelengkapannya, termasuk Masker
- Laptop Ujian Kompetensi
- Makan siang, 2x Coffee Break
- Sertifikat Pelatihan Kompetensi
- Penginapan selama 4 hari, 3 malam, Makan Pagi, Siang dan Malam (Khusus Peserta menginap)
- Doorprize Menarik

Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level - 1
(48 JP Model Pembelajaran Blended Learning)

BIODATA PESERTA 1

Nama Lengkap :
Nomor KTP (NIK) :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Instansi/Unit Kerja :
Email Aktif :
Nomor HP (Wajib WA) :
Pendidikan Terakhir :
Status Kepegawaian :

BIODATA PESERTA 2

Nama Lengkap :
Nomor KTP (NIK) :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Instansi/Unit Kerja :
Email Aktif :
Nomor HP (Wajib WA) :
Pendidikan Terakhir :
Status Kepegawaian :

Catatan : Formulir bisa diperbanyak sesuai jumlah peserta

Biaya Pelatihan :

- ☐ Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi : **Rp. 5.500.000**
- ☐ Penginapan, sarapan, dan Makan Malam selama 4 Hari 3 Malam (twin share) : **Rp. 6.750.000**
- ☐ Penginapan, sarapan, dan Makan Malam selama 4 Hari 3 Malam (single) : **Rp. 7.250.000**

Fasilitas Peserta

- Mengikuti e- Learning selama 10 (sepuluh) hari
- Mengikuti kelas Online sebanyak 2 (dua) kali Pertemuan
- Mengikuti kelas Tatap Muka selama 2 hari
- Mengikuti Ujian Kompetensi LKPP 1 Hari
- Materi dan Modul Softcopy
- Materi dan Modul Hardcopy
- Hardcopy dan Softcopy Perpres 46 tahun 2025 (Konsolidasi)
- Softcopy Perlem LKPP dan Standar Model Dokumen
- Tas dan Kelengkapannya, termasuk Masker
- Laptop Ujian Kompetensi
- Makan siang, 2x Coffee Break
- Sertifikat Pelatihan Kompetensi
- Penginapan selama 4 hari, 3 malam, Makan Pagi, Siang dan Malam (Khusus Peserta menginap)
- Doorprize Menarik

Pembayaran Dapat Dilakukan secara Transfer ke BANK :

1. BANK BRI : No. Rek : **213501000250301** an. Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional
2. BANK MANDIRI : No. Rek : **0060010942294** an. Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Sertifikat

Nomor: 000001/AKR.LPPBJ/Pusdiklat/21

Berdasarkan Keputusan Plt. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 185 Tahun 2021 Tanggal 8 Oktober 2021, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa:

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN KONSULTASI NASIONAL (LPKN)
Sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ)

Terakreditasi :

A

Untuk masa berlaku 5 (lima) tahun

Jakarta, 8 Oktober 2021

Plt. Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,



Sarah Sadiqa

Quality Management System
ISO 9001:2015 No: FS 644630